

InternationalMedia

RABU 12 JUNI 2024

HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM



KUNJUNGAN PRESIDEN KE POSYANDU WIJAYA KUSUMA KOTA BOGOR

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) dan Menkes Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) meninjau kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6). Presiden meninjau rangkaian pemeriksaan fisik terhadap bayi dan balita dalam pelaksanaan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Bogor.

IDN/ANTARA



Yayasan Tzu Chi Indonesia

Tidak perlu merasa khawatir atas banyaknya masalah, yang perlu dikhawatirkan adalah timbulnya masalah yang dicari-cari.
(MASTER CHENG YEN)



intiland



ASALTAU!

Bule Kembali Berulah di Bali, Rampas Truk hingga Tabrak Para Pengendara



PERILAKU wisatawan asing di Bali semakin menjadi-jadi. Seorang bule asal Inggris bernama Damon Anthony Alexander (50), merampas truk yang parkir di kawasan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali. Truk kemudian dibawa melaju kencang

Bersambung ke hal 11

YLKI Bersama Rakyat Tuntut Pemerintah Batalkan Tapera

Penerapan Tapera dinilai tak sesuai harapan masyarakat, yang menganggap subsidi untuk hunian warga, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

JAKARTA (IM) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menampilkan isu yang menyebut dana iuran

dari peserta, akan digunakan untuk menyokong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah untuk membatalkan penerapan program tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan, dorongan itu sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang, karena merasa keberatan dan terbebani.

"Kami melihat lebih banyak dimensi yang kontra terhadap

kebijakan ini daripada yang pro," ujar Tulus dalam focus group discussion (FGD) terkait Tapera, Selasa (11/6).

"Saya kira perlu pengkajian ulang dan juga penundaan atau bukan penundaan, tuntutan masyarakat kan dibatalkan," katanya.

Menurut Tulus, YLKI turut menyuarakan tuntutan tersebut karena melihat minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan

kebijakan Tapera oleh pemerintah. Permasalahan tersebut juga menjadi salah satu pemicu munculnya gelombang penolakan yang besar dari masyarakat.

"Itu menunjukkan eskalasi dari masyarakat yang mungkin dari sisi policy making process tidak dilibatkan, ataupun tidak tahu product knowledge-nya dan lain sebagainya," kata Tulus.

Bersambung ke hal 11

700 Ribu Meter Kubik Material Vulkanik Gunung Marapi Masih Mengancam

BANDUNG (IM) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan Gunung Marapi, Sumatera Barat, kembali erupsi, Selasa (11/6) pukul 1.37 WIB.

Berdasarkan hasil pengamatan, erupsi Gunung Marapi memiliki tinggi kolom abu lebih kurang 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 3.891 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramat berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7.2 mm dan durasi lebih

kurang 35 detik," tulis Badan Geologi dalam keterangannya.

Saat ini, Gunung Marapi berada pada Status Level III atau Siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki, wisatawan diimbau agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi Gunung Marapi.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat atas potensi ancaman 700 ribu meter kubik material vulkanik Gunung Marapi.

Bersambung ke hal 11

Sri Mulyani Beberkan Dilema Rencana Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan dilema dari wacana kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana disebutkan, PPN 12 persen akan diberlakukan paling lambat pada Januari 2025. Ketentuan itu melanjutkan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang telah

dilakukan sejak April 2022. "Undang-undangnya memang waktu itu membagi menjadi dua tahap kenaikan," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (11/6).

Namun demikian, Bendahara Negara bilang, pemerintah turut memperhatikan kondisi dari subjek PPN, dalam hal ini orang pribadi atau badan usaha. Kondisi dari subjek PPN akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan tarif PPN, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

nasional.

Akan tetapi di sisi lain, pemerintah perlu mengerek tingkat pendapatan negara, guna mengakomodir kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

"Tentu juga ada kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama sesudah kenaikan belanja yang sangat besar pada saat pandemi," tutur Sri Mulyani.

Terkait dengan keputusan

Bersambung ke hal 11

YouTuber Ria Ricis Diperas Rp300 Juta, Pelaku Ancam Sebar Foto ke Medsos

JAKARTA (IM) - Tersangka pengancaman dan pemeras sebanyak Rp300 juta terhadap artis Ria Ricis akhirnya ditangkap polisi, Senin (10/6).

"Pada tanggal 10 Juni 2024 Senin, pukul 01.20 WIB dini hari, tim penyidik berhasil melakukan upaya paksa penangkapan tersangka AP di rumahnya di Kelurahan Cipayang Jaktim," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safrin Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (11/6).

Tersangka berinisial AP itu langsung digiring ke Polda Metro Jaya dan langsung menjalani serangkaian pemeriksaan. "Dibawa ke Mako kantor penyidik Subdit Siber

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana," katanya.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, resmi menaikkan status perkara laporan YouTuber Ria Ricis dalam kasus pemerasan dan pengancaman ke tingkat penyidikan.

"Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik memutuskan untuk menaikkan status pelaporan dari penyelidikan ke penyidikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam In-

Bersambung ke hal 11



IDN/ANTARA

RAKER KEMENKEU, BAPPENAS DAN BI DENGAN KOMITE IV DPD

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan Komite IV DPD di Ruang GBHN, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6). Raker tersebut membahas harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka penguatan ekonomi nasional serta membahas kebijakan dalam menjaga stabilitas dan perlindungan ekonomi berkelanjutan.



BANK MAYAPADA
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	16.325,00	16.305,00
SGD	12.081,00	12.051,00
AUD	10.801,00	10.761,00
HKD	2.122,00	2.062,00
EUR	17.767,00	17.517,00
GBP	21.014,00	20.744,00

Selasa 11 Juni 2024 15:30 WIB

Kunjungi Website Kami di: <https://internationalmedia.co.id>